

EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN ISLAM NUSANTARA

(Studi Interpretatif-Symbolik atas Peran Kampus, Pesantren dan Lembaga Adat)

Junaidi Hamsyah
Fakultas Tarbiyah IAIN Bengkulu
junaidihamsyahbkl@yahoo.co.id

Abstrak

Lembaga pendidikan Islam perlu kembali ke akar historisnya guna meneguhkan identitas, karakter, kekhasan, dan keunikan. Terdapat sebuah spirit yang tak lekang oleh waktu, bahkan mendasari model pendidikan ideal di era kontemporer. Sejarah pendidikan Islam yang digagas oleh para wali merupakan cerminan bagaimana semestinya Islam disampaikan. Di era kontemporer umat muslim Indonesia, spirit pendidikan Islam ala para wali menemukan momentum dan sekaligus wadahnya, yaitu melalui tiga lembaga pendidikan yang ada: pesantren, kampus, dan lembaga adat. Ketiganya membutuhkan upaya integrasi, sinergi, dan modifikasi yang kontekstual. Apabila sistem dari tiga lembaga ini sudah terkoneksi maka epistemologi pendidikan Islam khas Nusantara bisa terwujud.

Kata Kunci: *Epistemologi, Pendidikan, Islam, Nusantara*

Abstract

THE EPISTEMOLOGY OF ARCHIPELAGO ISLAMIC EDUCATION (The interpretative Study – Symbolic on the Campus Role, Al-Quran Islamic School and Custom Institution): The Islamic educational institutions need to be back and know the historical root to confirm the identity, character, distinctiveness and uniqueness. There is the timeless spirit to underlying model of ideal education in the contemporary era. The history of Islamic

education was initiated by the trustees is a reflection of how Islam should be delivered. In the contemporary era of Indonesian Muslims, the spirit of Islamic education in the style of the trustees found that the momentum and the three existing educational institution are including schools, colleges, and traditional institutions. Those three institutions need the contextual efforts, synergies, and modifications to improve. If those systems in the three institutions have been connected, the epistemology of Islamic education Archipelago can be realized.

Keywords: *Epistemology, Education, Moslem, Archipelago.*

A. Pendahuluan

Memahami substansi model pendidikan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah dakwah dan karakteristiknya yang dipelopori oleh para wali, saudagar, da'i-da'i. Sejarah menjadi bahan refleksi utama sekaligus data utama untuk merumuskan tipe pendidikan Islam yang ideal. Jika data bicara bahwa epistemologi dakwah Islam awal mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai Islam, rasio logis universal, dan upaya kontekstualisasi kultural maka pendidikan Islam ke depan harus mampu menerapkan integrasi epistemologis tersebut.¹

Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa spirit rasional logis ada pada model pendidikan Islam awal. Karakter ini dapat dijumpai melalui pembacaan kritis atas individu-individu sang da'i, yang notabene sebagian dari mereka adalah para pedagang. Islam disebarkan oleh para pedagang (Arab, Persia maupun Gujarat),² yang memiliki orientasi bisnis dalam kehidupan sehari-

¹ Para da'i muslim yang menyebarkan Islam pertama kali di Indonesia berhasil menyesuaikan diri dengan konteks sosial politik serta kultur masyarakat setempat. Oleh karenanya, Islam diterima dengan mudah sehingga menjadikan Nusantara hingga kini sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ahmad Sugiri, "Proses Islamsisasi dan Percaturan Politik Umat Islam di Indonesia", dalam *Al-Qalam, Majalah Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan*, No. 59/XI/1996, (Serang: IAIN SGD, 1996), hlm. 43

² Busman Edyar, dkk (Ed.), *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2009), hlm. 207. Lihat juga Badri Yatim, *Sejarah Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 1998), hlm. 23-30

hari mereka, dan paradigma untung rugi tidak bisa dilepaskan dari kepribadiannya. Sangatlah sah apabila di kemudian hari, termasuk hari ini, Pendidikan Islam dikembangkan oleh para pebisnis seperti yang telah dicontohkan oleh sejarah.

Selain faktor karakter individu dan kepribadian para da'i muslim awal, faktor lain mengapa Islam menjadi mudah diterima, ajaran-ajaran Islam gampang dipahami, adalah watak umat muslim itu sendiri. Mengingat Islam adalah agama 'impor' yang didatangkan dari kultur masyarakat asing, tentu saja proses penyebarannya tidak bisa dilepaskan dari media yang digunakan. Para pedagang dan da'i muslim datang ke Nusantara menggunakan kapal di jalur laut, dan mereka singgah pertama kali di daerah-daerah pesisir. Jadi, umat muslim Nusantara pertama kali adalah masyarakat pesisir, dengan segala watak dan kepribadian yang terbuka, plural, rasional dan logis.³

Perpaduan antara karakter da'i sebagai subjek pendidikan Islam dan masyarakat pesisir sebagai objeknya adalah inspirasi bagi generasi sekarang. Sebagai subjek pendidikan, pelaku, pengelola, supervisi, manajer operasional, maka dai'i-da'i penyebar Islam awal sangatlah ideal. Mereka memiliki pengalaman yang luas, berwawasan internasional, terlibat aktif dalam persaingan global, serta bergelut dengan dinamika materialistik setiap harinya. Islam yang disebarkan melalui jalur perdagangan⁴ menimbulkan konsekuensi logis yang menguntungkan, terlebih bagi pengelola pendidikan Islam dan masyarakat penerimanya sebagai peserta didik. Keuntungan besar tersebut adalah memiliki karakter nilai-nilai rasional-universal yang melekat pada pribadi da'i maupun umat yang menerima ajaran Islam.

Mengingat subjek pendidikan Islam di sini memegang nilai-nilai universal yang ditopang oleh pengalaman tingkat internasional maka otomatis segala pertimbangan rasional-logis yang mendukung bagi penyebaran Islam dan diterimanya ajaran Islam dilakukan, termasuk memahami konteks sosial-politik

³ Ahmad Al-Usairy, *Sejarah Islam, Sezak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, (Jakarta: Akbar Media, 2003), hlm. 336.

⁴ Uka Tjandrasmita (Ed.), *Sejarah Nasional Indonesia III*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm, 200

pada jamannya. Pada awal penyebaran Islam, adipati-adipati pesisir banyak yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan pusat yang lokasinya lebih ke pedalaman. Upaya independensi semacam ini menuntut adanya simbol kultural baru yang berguna bagi kepentingan politik. Untuk itulah, kedatangan ajaran Islam menemukan momentum yang tepat dengan adanya kepentingan para adipati tersebut. Kedatangan Islam pun semakin mudah diterima, dan kelak dapat dimanfaatkan sebagai modal politik untuk membangun kerajaan Islam.⁵

Bagi seorang pendidik, kecerdasan berpikir kreatif supaya ajaran Islam dapat diterima oleh masyarakat adalah *tools* atau instrument utama. Kecerdasan kreatif ini adalah suatu bakat dan potensi yang harus dimiliki, terlebih dalam rangka memahami situasi dan konteks dimana mereka tinggal dan menetap, lebih spesifik lagi dimana lembaga pendidikan Islam itu didirikan. Setidaknya, apabila kecerdasan kreatif semacam ini tidak bisa dicapai oleh individu pendidik maka tanggungjawab dan tugas dapat dibebankan kepada lembaga pendidikan. Dengan kata lain, institusi bertanggungjawab untuk menyusun visi-misi, kurikulum, dan metodologi pengajaran yang cerdas nan kreatif.

Bukan saja situasi politik yang menjadi objek pemikiran dari para da'i muslim awal. Lembaga kultural juga diapresiasi dan dimanfaatkan sebagai salah satu saluran penyebaran Islam. dalam prakteknya, para da'i akan menikahi putri-putri dari kalangan pribumi, menyatukan diri dengan kebudayaan setempat, mengikuti tradisi dan menjadi bagian integral dari kaum pribumi sendiri. Melalui lembaga pernikahan ini, para saudagar asing itu telah melengkapi identitas dirinya sebagai orang pribumi. Dengan begitu, di dalam pribadi seorang da'i terdapat dua identitas; keturunan asing dan warga pribumi. Dalam konteks interpretatif yang lebih luas, subjek pendidikan adalah representasi dari logika rasional dan lembaga adat.⁶

Pada akhirnya, upaya kolaborasi antara simbol rasional-logis dengan simbol kultural memang berhasil dan membuahkan keuntungan besar bagi proses Islamisasi dan penyebaran Islam.

⁵ *Ibid.*, hlm. 201.

⁶ *Ibid.*, hlm. 202

Islam dapat diajarkan kepada publik tanpa perlu segan-segan, serta tidak mendapatkan pertentangan keras dari masyarakat. Perkampungan demi perkampungan muslim terus terbentuk dari hari ke hari. Jumlah masyarakat muslim yang menerima ajaran Islam dan menjalankan dalam praktek keseharian hidup mereka semakin bertambah pula.⁷ Semua itu tidak lepas dari epistemologi pendidikan Islam yang dijalankan oleh para da'i muslim awal.

Tetapi, kecerdasan kratif yang dimiliki oleh para da'i muslim awal itu tidak berhenti pada upaya integrasi antara simbol kultural dan simbol rasional, melainkan juga memasukkan unsur logika mistis ke dalam epistemologi dakwah mereka. Hal itu ditandai dengan penggunaan saluran tasawuf sebagai salah satu media menyebarkan Islam. Dengan kata lain, dai'i-da'i muslim mengembangkan bakat sufistik mereka, cakrawala pengetahuan sufisme, dan praktek-praktek *suluk* lainnya dalam rangka menyampaikan Islam kepada penduduk pribumi.⁸

Penggunaan media sufisme dalam rangka mengajarkan Islam kepada pribumi sangatlah tepat dan kontekstual, bukan saja pada jaman itu melainkan juga hari ini. Orang-orang Nusantara adalah manusia religius yang mengembangkan tradisi batin cukup kuat. Peninggalan-peninggalan mereka sebagai simbol masyarakat berketuhanan bertahan hingga sekarang. Sufisme adalah salah satu aliran dalam madzhab Islam, yang lebih menekankan rasa dalam berketuhanan dan beragama, daripada pertimbangan rasio. Namun, terlepas dari apa definisi sufisme itu sendiri, yang jelas pendidikan Islam di Nusantara memanfaatkan sufisme sebagai salah satu metode pengajaran dan pendidikan Islam.⁹

Dalam tulisan ini, tiga simbol di atas (sufisme, adat dan rasionalitas) dicarikan wadah formal-strukturalnya sehingga pencarian akan epistemologi pendidikan Islam yang ideal menemukan muaranya. Karenanya, tulisan ini mencoba memahami peran simbolik yang dimainkan oleh lembaga pesantren, lembaga perguruan tinggi (kampus) dan lembaga adat sebagai wadah

⁷ Badri Yatim, *Sejarah Islam di Indonesia*,., hlm. 202.

⁸ Uka Tjandrasasmita (Ed.), *Sejarah Nasional Indonesia III*, hlm.

⁹ Busman Edyar, dkk (Ed.), *Sejarah Peradaban Islam, ibid.*, hlm. 208

formal-struktural yang sangat representatif untuk mewakili nilai sufisme, rasionalitas dan kultural. Mengintegrasikan tiga lembaga ini adalah mimpi idealis tentang pengelolaan dan manajemen pendidikan Islam di era mendatang.

Teori fungsionalis-strukturalis dan teori respon pembaca (*response-reader theory*) digunakan dalam tulisan ini untuk menggali makna-makna ideal yang diinginkan, terlebih dalam memahami peran dan fungsi tiga lembaga tersebut. Teori fungsionalisme struktural itu sendiri adalah sudut pandang dalam sosiologi dan antropologi, yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Tidak ada satupun lembaga atau institusi dalam masyarakat yang terpisah dari lainnya.¹⁰ Karena sifatnya yang saling terkait itu maka teori ini sangat cocok untuk menganalisa peran-peran apa saja yang bisa dimainkan oleh lembaga pesantren, lembaga kampus atau perguruan tinggi dan lembaga adat, terlebih dalam membangun basis epistemologis pendidikan Islam.

Fungsionalisme Struktural juga menyoroti perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu efek dari perubahan yang terjadi pada salah satu bagiannya. Apabila perubahan terjadi pada salah satu unsur pembentuk tatanan masyarakat maka ia akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian yang lain.¹¹ Asumsi ini juga bisa digunakan dalam membaca efek domino apabila tiga lembaga tersebut dibiarkan berjalan sendiri-sendiri, terutama akan dirasakan langsung oleh masyarakat muslim. Apabila pesantren, kampus dan lembaga adat tidak bersinergi maka praktek keberagaman umat dapat terpola yang dikhawatirkan saling menegasikan. Tidak bisa dipungkiri produk kampus akan berseberangan dengan produk pesantren, misalnya.

Sedangkan teori respon pembaca digunakan sebagai metode untuk mengungkapkan pemikiran kritis penulis tentang objek yang dikaji. Lois Tyson mengatakan bahwa seorang pembaca dibentuk

¹⁰ Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep & Teori*, (Bandung: Refika Aditama, 20013), hlm. 173

¹¹ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi pustaka publisher, 2007), hlm. 48

oleh teks-teks yang mengelilinginya, oleh objek-objek yang berada di sekitarnya. Teks dan objek sama-sama kreatif seperti seorang pembaca, terlebih dalam menciptakan makna sebagai unsur utama pembentuk sebuah keyakinan. Dengan kata lain, makna itu adalah hasil kolaborasi apa yang diberikan teks dan apa yang dipikirkan oleh pembaca.¹²

Tawaran pemikiran bahwa integrasi dan sinergitas antara lembaga pesantren, kampus dan lembaga ada sebagai basis epistemologi pendidikan Islam di Nusantara adalah makna hasil yang dihasilkan oleh kolaborasi antara realitas objektif-eksternal dan perenungan subjektif-internal penulis. Karenanya, berikut akan dipaparkan dengan detail tentang peran-peran simbolik yang dimiliki oleh ketiga lembaga tersebut.

B. Kampus, Representasi Rasionalisme

Mari sejenak menoleh ke sejarah kampus di Indonesia. Kampus atau perguruan tinggi adalah suatu lembaga pendidikan yang lahir atas desakan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam sejarah Indonesia pada tahun 1920, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mendirikan Technische Hooge School (Sekolah Tinggi Teknik) di Bandung. Dilihat dari faktor sosial-politik, sekolah tinggi ini dibutuhkan karena semakin minimnya tenaga ahli yang bisa bekerja di bidang industri, mengingat Perang Dunia I membuat hubungan dengan Belanda terputus.¹³

Namun, lebih dari itu, sejatinya masyarakat maupun pemerintah Hindia-Belanda memiliki kesadaran kritis bahwa satu-satunya pilihan untuk keluar dari kemelut situasional adalah dengan mendirikan suatu perguruan tinggi, yang diharapkan mampu mengisi kekosongan tenaga kerja profesional.¹⁴ Tenaga-

¹² Lois Tyson, *Critical Theory Today: A User-Friendly Guide*, cet.2, (New York: Routledge, 2014), hlm. 169

¹³ Prof. S. Nasution, M.A., *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 142

¹⁴ "Surat Direktur Pekerjaan Umum J. Homan van der Heide kepada Gubernur Jenderal Idenburg" tanggal 27 Januari 1913 nomor 1606/D. dalam Depdikbud RI, *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*, (Jakarta: Badan Penelitian

tenaga ahli yang profesional, yang telah mengenyam perbalkan mata pelajaran umum, yang memiliki cara berpikir logis, rasional dan ilmiah, sangatlah dibutuhkan untuk memecahkan masalah kehidupan pada waktu itu. Intinya, kampus dibutuhkan bukan karena ia mengajarkan ilmu-ilmu agama yang mistik berbasis keimanan melainkan karena mengajarkan ilmu-ilmu yang praktis rasional.

Kesadaran rasional yang berbuntut pada tuntutan dibentuknya kampus di Indonesia, sejatinya, telah jauh hari muncul ke dalam kesadaran kolektif masyarakat pribumi. Pada tahun 1909, dibentuklah oleh masyarakat pribumi suatu lembaga khusus yang bernama *Indische Universiteitsvereniging*. Badan ini memperjuangkan pentingnya didirikannya Universitas di negeri Hindia-Belanda. Namun, kesadaran berbasis rasional ini ditekan dan dihambat oleh pemerintah Hindia-Belanda sehingga tidak pernah berhasil sebelum tahun 1918. Alasan utama yang disampaikan oleh pemerintah kolonial adalah kekhawatiran bahwa masyarakat pribumi belum sanggup menerima mata pelajaran dan model pendidikan ala Barat yang rasional.¹⁵

Tentu saja, penolakan pemerintah kolonial ada benarnya. Selain khawatir di kemudian hari muncul intelektual pribumi yang setara dengan bangsa Eropa, dan memungkinkan untuk melawan, juga karena model pendidikan Eropa yang dibawa Belanda sangat rasional, berbasis ilmiah, berdasar empiris. Sementara tradisi rasionalisme khas Eropa belum terbentuk di Indonesia. Hal itu terbukti ketika saran untuk membentuk perguruan tinggi kampus datang dari orang-orang yang pertimbangannya juga rasional empiris. Pemerintah Belanda mau tidak mau harus mengabdikan tuntutan berupa pembentukan universitas atau kampus.

Pada tahun 1918, Technische Onderwijs Commissie, panitia pendidikan teknik, mengeluarkan pendapat dan saran yang sama. Anggota-anggota komisi ini terdiri dari orang-orang yang pikirannya berbasis pada data empiris dan kebutuhan faktual,

dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), hlm. 1

¹⁵ “Surat Direktur Pendidikan dan Agama G.A.J. Hazcu kepada Gubernur Jenderal Idenburg”, tanggal 27 November 1914 nomor 23814, dalam Depdikbud RI, *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*, *ibid.*, hlm. 3

seperti kepala-kepala dinas pemerintahan, yang terdiri dari kepala irigasi, pertambangan, tenaga air, listrik, kereta api, kepala pabrik, wakil departemen pengajaran, kepala sekolah teknik menengah dan inspektur sekolah menengah.¹⁶

Pemikiran rasional yang berbasis pada analisa data empiris terus berkembang dari tahun ke tahun. Masyarakat yang tinggal di daerah kekuasaan Hindia-Belanda mulai memikirkan tentang kebutuhan akal skil di bidang-bidang yang lain selain industri dan teknik. Karenanya, secara berturut-turut pada tahun 1924, 1927, dan 1938 berdirilah kampus-kampus yang fokus mendidik mahasiswa untuk mendalami ilmu hukum, kedokteran dan ilmu pemerintahan. Di sana ada kampus *Rechthoogeschool* (Sekolah Tinggi Hukum), *Geneeskundige Hogeschool* (Sekolah Tinggi Kedokteran) dan *Bestuursacademie* (Sekolah Tinggi Pemerintahan) yang kesemuanya berdiri di Batavia.¹⁷

Seiring dengan runtuhnya kekuasaan Belanda di tangan Jepang, orientasi rasional pendidikan tinggi kampus pun berubah. Apabila Belanda menginginkan lulusan kampus memiliki skill dan kemampuan teknis yang bisa mengisi pos-pos pekerjaan tertentu di bidang sosial dan politik, Jepang menginginkan lulusan kampus menjadi tenaga militer yang memenangkan perang. Karenanya, Jepang menutup sebagian kampus dan membuka sebagian yang lain. Pertimbangan rasional Jepang menuntut adanya tenaga-tenaga militer yang handal, dan lulusan kampus harus memenuhi ekspektasi tersebut.¹⁸

Sampai di sini, kita dapat mengatakan bahwa kampus adalah cerminan dari rasionalisme yang metode berpikirnya adalah empiris, paradigmanya pragmatis, datanya kuantitatif, dan sekalipun tujuannya idealis-subjektif. Karenanya, para pengelola pendidikan kampus dan orang-orang yang belajar di

¹⁶ Prof. S. Nasution, M.A., *Sejarah Pendidikan Islam, ibid.*, hlm. 143

¹⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Perguruan Tinggi dan Pembangunan Berkelanjutan (sebuah tinjauan aspek hukum)*, (Jakarta: Dirjen Dikti Diknas, 2001), hlm. 3

¹⁸ Helius Syamsuddin, dkk., *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*, (Jakarta: Depdikbud Dirjen Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan DOKumentasi Sejarah Nasional, 1993), hlm. 5

dalamnya (mahasiswa) juga cerminan dari simbol rasionalisme. Kita ambil contoh pemerintah Belanda sebelum tahun 1942 telah membentuk berbagai fakultas-fakultas yang tersebar di Batavia (Jakarta), Bogor, Bandung dan Surabaya. Jurusan-jurusannya berupa Hukum, Kedokteran, Kedokteran Hewan, Kedokteran Gigi, Ekonomi, Sastra, Pertanian, dan Teknik. Spesifikasi semacam itu adalah persiapan untuk membentuk Universitas van Indonesie (Universitas Indonesia).¹⁹ Artinya, rasionalisme khas Eropa dengan spesifikasi dan spesialisasi jurusan semacam itu hendak diterjemahkan dalam konteks alam pikiran masyarakat Indonesia.

Selain sejarah yang menjadi bukti kampus sebagai representasi simbolik dari rasionalisme, tridharma perguruan tinggi juga memperkuat status dan identitas tersebut. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.²⁰ Mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi didik untuk melakukan penelitian yang berguna bagi kebaikan masyarakat. Tentu saja, penelitian ini berbasis data empiris dan rasional, mencari problem-problem kehidupan dan menemukan pemecahannya. Hanya dengan begitu pendidikan menjadi bermanfaat.

Tridharma perguruan tinggi adalah nilai-nilai yang dipegang teguh oleh mahasiswa untuk menjadi pribadi yang rasional serta berguna bagi masyarakat melalui pengabdianya. Otomatis, *goals* tridharma ini mencetak kader-kader militan, rasional, kritis, logis, ilmiah, dan heroik dalam arti yang paling luas, yaitu berkontribusi bagi bangsa dan negara. Karena tujuannya yang rasional maka kurikulum pendidikan tinggi, proses belajar-mengajar, metodologi-metodologi yang digunakan dalam riset dan penelitian, semuanya mencerminkan suatu proses dialektika kritis. Puncaknya, kampus adalah ruang fisik yang secara simbolik merupakan spirit rasionalisme modern.

¹⁹ Prof. Dr. Enoch Markum (ed.), *Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 28, 31

²⁰ UU No. 12 Tahun 2012, Pasal 1 ayat 9

Bukan hanya masyarakat Indonesia secara umum yang memikirkan cara pendidikan rasional yang diterjemahkan melalui pembentukan perguruan tinggi, umat muslim Indonesia yang lebih sempit juga melakukan hal sama. Umat muslim terus memikirkan bagaimana cara membangun pendidikan tinggi yang melebihi model pendidikannya yang lebih sederhana, yang notabene jauh hari sudah terbentuk, yaitu pondok pesantren. Muncullah gagasan tentang Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang berkembang menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Universitas Islam Negeri (UIN). Perguruan Tinggi Islam (PTI) ini pun tidak lepas dari kehendak umat muslim untuk mengikuti perkembangan dan menjawab seluruh tantangan kehidupan yang terus berkembang seiring perubahan jaman.²¹

Pada prinsipnya, kampus Islam maupun kampus negeri sama saja, yaitu menerapkan tridharma perguruan tinggi dan mengembang spirit spesifikasi keilmuan sebagai basis kebutuhan dan efek dari rasionalitas. Dengan kata lain, kampus apapun tetaplah simbol utama sekaligus representasi dari rasionalisme pendidikan. Jika ingin menemukan lembaga pendidikan yang berbasis pada rasionalitas maka kampus adalah salah satu wujud konkritnya. Berbagai jenis disiplin ilmu pengetahuan, berbagai metode ilmiah, semuanya diajarkan di kampus-kampus, baik Islam maupun negeri. Alhasil, kampus adalah lembaga rasionalitas.

Dalam sejarahnya, alasan untuk membentuk perguruan tinggi Islam juga pertimbangan rasional. Dr. Satiman Wirjosandjoyo mengatakan bahwa perguruan tinggi Islam dapat mengangkat harkat martabat umat muslim di Hindia-Belanda yang terjajah.²² Gagasan untuk membentuk kampus yang bisa mengangkat harkat martabat umat muslim itu baru terbentuk pada tanggal 8 Juli 1945 ketika Sekolah Tinggi Islam berdiri di Jakarta di bawah pimpinan Prof. Abdul Kahar Muzakir. Dalam sidang Panitia Perbaikan STI yang dibentuk pada bulan November 1947 diputuskan untuk

²¹ Enung K. Rukiati dan Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 128

²² Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 314-15

mendirikan Universitas Islam Indonesia (UII). Akhirnya, UII bisa didirikan pada 10 Maret 1948 dengan empat fakultas: Agama, Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan. Ini memiliki logika yang sama dengan kampus yang didirikan oleh Belanda, yaitu spesifikasi jurusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional.

Selanjutnya, pada tanggal 20 Februari 1951, Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII) yang jauh hari berdiri di Surakarta, tepatnya pada 22 Januari 1950, ikut bergabung dengan UII yang berkedudukan di Yogyakarta.²³ Niatan ini sama dengan Belanda yang ingin menggabung semua fakultas yang berdiri di Batavia, Bogor, Bandung, Surabaya, dan Makasar. Artinya, para intelektual Nusantara dari berbagai elemen memiliki cara pandang yang sama, rasional, sehingga mengerti bagaimana membangun perguruan tinggi yang ideal.

Singkat cerita, pada perkembangannya, setelah berdiri cabang-cabang yang terpisah dari pusat dan demi untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang lebih luas terhadap masyarakat, para pengelola pendidikan tinggi Islam melakukan rasionalisasi manajerial. Pada tahun 1977 sebanyak 40 fakultas cabang IAIN dilepas menjadi 36 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang berdiri sendiri. Kebijakan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997.²⁴ Dengan begitu, manajemen lebih rapi, ramping, efektif dan efisien. Tentu saja, semua itu tidak lepas dari tradisi rasionalisme yang mengakar dalam spirit dunia kampus. Pertimbangan-pertimbangan empiris kontekstual selalu menjadi pijakan dalam berpikir. Kini, IAIN banyak tumbuh menjelma UIN.

Terlepas dari proses perubahan nama-nama, yang hendak disampaikan di sini adalah pertimbangan dan nalar rasional yang melatarbelakangi semua perubahan sejarah kampus Islam tersebut. Dengan melihat dan mempertimbangkan kondisi-kondisi aktual-faktual, kebutuhan-kebutuhan empiris masyarakat, maka pendidikan Islam terus bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang diidamkan oleh masyarakat, mampu membekali

²³ Rusminah, (dkk). "Perguruan Tinggi Agama Islam (UIN, IAIN, dan STAIN)", dalam *Insan Cendekia*, 2010, hlm.1

²⁴ *Ibid.*, hlm. 9

peserta didiknya dengan bakat dan skill yang memampukan mereka bersaing di tataran global. Inilah spirit rasionalisme yang melatarbelakangi gerak sejarah kampus, dan sekaligus menjadikan kampus sebagai simbol dari rasionalisme itu sendiri.

C. Pondok Pesantren, Representasi Nalar Religius

Setelah kampus sebagai representasi dari kekuasaan rasionalisme, khazah pendidikan di Nusantara ini memiliki representasi lain yang tidak kalah saing, yaitu Pondok Pesantren. Lembaga yang terakhir ini adalah representasi dari nalar religius murni maupun pengembangan dan pengayaannya. Pondok Pesantren tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama yang sakral dan jauh dari pengaruh-pengaruh profanitas. Di kalangan masyarakat pesantren, lembaga ini dijadikan tempat belajar nilai-nilai agama yang bersumber pada wahyu.

Tetapi kemudian, agama dan wahyu sebagai spirit utama dari ruh perjalanan pondok pesantren tidak bisa diartikan secara sempit. Sebab, secara historis, pesantren telah mendokumentasikan berbagai catatan sejarah gemilang bangsa Indonesia, baik sejarah sosial budaya masyarakat Islam, ekonomi maupun politik bangsa Indonesia. Sejak awal penyebaran Islam, pesantren menjadi saksi utama bagi penyebaran Islam di Indonesia, perubahan besar terhadap persepsi halayak nusantara tentang arti penting agama dan pendidikan.²⁵

Agama di tangan kalangan pesantren lebih dinamis, progresif, dan responsif terhadap perubahan dan tuntutan jaman. Agama menjadi spirit berkebangsaan dan bernegara. Orang-orang pesantren selain erat memegang teguh nilai-nilai agama juga berkontribusi besar kepada perjuangan meraih kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan dengan gerakan peradabannya. Terlepas sejauh mana peran pesantren dalam sejarah, yang jelas, lembaga pendidikan milik umat muslim ini tidak lepas dari spirit dan nalar religius yang menghidupinya.

Sejak awal pertumbuhannya, fungsi utama pesantren

²⁵ A. Mujib, et. al., *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren*, Cct. III, (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), hlm. 1

adalah menyiapkan santri mendalami dan menguasai ilmu agama Islam atau lebih dikenal *tafaqquh fi al-din*. Konsep *tafaqquh* ini sangat ampuh dalam rangka mencetak kader-kader ulama, intelektual muslim, dan pada akhirnya pesantren turut serta dalam gerakan mencerdaskan masyarakat, melakukan dakwah untuk menyebarkan agama Islam, serta menjadi benteng pertahanan bagi umat dari serangan-serangan akidah yang menyesatkan.

Penguatan nalar religius pesantren ini akan selama bertahan selama masyarakat pesantren sendiri tidak menjauh dari sumber-sumber pegangannya, yaitu kitab-kitab kuning. Sebab, sedari awal, materi yang diajarkan oleh pondok pesantren terdiri dari materi-materi agama yang diambil dari kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab atau lebih dikenal dengan kitab kuning.²⁶ Berbeda kemudian dengan pondok pesantren modern, suatu terma konseptual yang belakangan dikenal, yaitu pondok pesantren yang mulai mengadopsi materi-materi umum, yang mendorong para santri untuk berpikir lebih luas. Tema ini yang akan dibahas pada point berikutnya dalam tulisan ini.

Tetapi, terlepas bagaimana bentuk perkembangan pesantren modern, kita melihat dalam sejarah bahwa melalui nalar religiusnya itu pesantren mampu memerankan diri sebagai lembaga pendidikan yang memiliki akar kuat (*indigenous*) pada tradisi masyarakat muslim Indonesia, mampu menjaga dan mempertahankan keberlangsungan dirinya (*survival system*), serta memiliki mengadopsi berbagai model pendidikan sehingga bersifat multi-aspek. Santri tidak hanya dididik menjadi pribadi yang mengerti ilmu agama, tetapi juga mendapat tempaan mental yang kuat, dilatih menjadi kepemimpinan yang handal, memiliki sikap kemandirian, sifat kesederhanaan, ketekunan, kebersamaan, kesetaraan, dan karakter-karakter positif lainnya.

Bagaikan bakat alami yang diwarisi kehidupan, Pondok Pesantren mampu bertahan dan terus berkembang searah dengan tujuan pembangunan nasional. Pesantren mampu berperan aktif dalam mencerdaskan bangsa sesuai yang diamanatkan oleh

²⁶ Tim Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Profil Pondok Pesantren Mu'adalah* Cet. I, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Departemen Agama, 2004), hlm. 3

Undang-undang Dasar 1945.²⁷ Telah banyak kader-kader pesantren yang berjasa besar bagi tercapainya cita-cita kemerdekaan dari kolonialisme Belanda dan Jepang. Bahkan, pengaruh pesantren kepada founding fathers kita, Soekarno, juga besar.

Ini semua berarti bahwa nalar religius yang dipertahankan sekaligus menjadi spirit kehidupan pesantren tidak bertentangan dengan cita-cita nasionalisme. Sinergisitas antara nalar religius dan nalar rasional murni merupakan potensi besar yang bisa dimaksimalkan. Mungkin, semua itu adalah pengaruh usir pesantren yang—bila disandingkan dengan lembaga pendidikan yang pernah muncul di Indonesia—lebih tua dari semua lembaga pendidikan lainnya. Usia yang tua ini menjadikan pesantren lebih dewasa dalam menyikapi tuntutan jaman, tanpa harus mengubah jati diri dan identitas tetapi tetap bisa ikut perubahan dan perkembangan. Dalam tradisi pesantren pun terkenal slogan *al-muhafadhah ala al-qadim al-sholeh wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*.

Eksistensi pesantren di era kontemporer ini merupakan bukti terkuat bahwa nalar religius bagian terpenting dalam sistem pendidikan kita, terlebih sebagai produk budaya Indonesia, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang kemunculannya di kalangan masyarakat Islam di Nusantara bersamaan dengan awal penyebaran Islam.²⁸ Tujuh abad lebih sejak Islam awal masuk ke Indonesia, pesantren tetap mampu bertahan dengan nalar religiusnya. Ini sebuah prestasi tersendiri bagi suatu lembaga pendidikan yang mampu mempertahankan jati dirinya selama itu.

Di lembaga pesantren inilah kaum muslimin Indonesia mendalami doktrin dasar Islam, khususnya menyangkut praktek kehidupan keagamaan. Setiap detail kehidupan dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa bahkan bernegara yang bersentuhan dengan agama, pesantren menyediakan materi-materi pelajarannya.

²⁷ Amin Haedari, et al., *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplexitas Global*, Cct. I, (Jakarta: IRD Press, 2004), hlm. 3.

²⁸ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*, Cct. II, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 1-6

Kitab-kitab yang membahas tentang etika-etika mulai dari ranah-
ranah individual seperti kamar mandi sampai ranah publik seperti
tatacara menjalankan negara, diajarkan dengan sempurna di
lembaga pesantren. Dengan kata lain, nyaris tidak ada satu pun
aspek kehidupan manusia yang lepas dari bidikan pendidikan
pesantren, selama bersentuhan dengan nalar agama.²⁹

Nalar religius yang bertahan di pesantren tidak bisa
dilepaskan dari beberapa ciri umum yang dimiliki oleh pesantren
itu sendiri, baik sebagai lembaga pendidikan Islam maupun sebagai
lembaga sosial yang secara informal terlibat dalam pengembangan
masyarakat. Ciri-ciri pada dirinya sendiri menyimpan nilai-
nilai intrinsik yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh agama.
Zamakhsyari Dhofier mengajukan lima unsur yang merupakan
elemen pesantren, yaitu pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab
Islam klasik, santri, dan kiai. Kelima unsur pesantren tersebut
diuraikan sebagai berikut:³⁰

Pertama, Masjid. Unsur pertama yang pasti ada di
lingkungan pesantren adalah Masjid. Pada hakikatnya, masjid
merupakan pusat kegiatan kaum muslimin, dan hal itu telah
dicontohkan sejak jaman Rasulullah saw. Bersama para sahabat,
Rasulullah saw membangun masyarakat dan negara Madinah
dimulai dari pembangunan masjid. Selain itu, masjid adalah
tempat ibadah kepada Allah swt. Dengan menggunakan masjid
maka nilai-nilai spiritual tidak akan pernah bisa dilepaskan.

Di dunia pesantren, eksistensi masjid dijadikan sebagai
simbol bagi terselenggaranya kegiatan pendidikan Islam, baik
dalam pengertian modern maupun tradisional. Dalam konteks
yang lebih jauh, masjidlah yang menjadi pesantren pertama, yaitu
tempat berlangsungnya proses pembelajaran. Seorang kiai yang
ingin mengembangkan sebuah pesantren pasti mendirikan masjid
di dekat rumahnya. Tujuannya adalah efektifitas dan efisiensi
waktu, dan pertimbangan lain.³¹ Karena pondok pesantren pasti

²⁹ Sulthon Masyhud, et al., *Manajemen Pondok Pesantren*, Cct. II,
(Jakarta: Diva Pustaka, 2004), hlm. 1

³⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Memadu Modernitas untuk
Kemajuan*, Cct. I, (Jakarta; Pesantren Nawesca Press, 2009), hlm. 44-60

³¹ M. Bahri Ghazali, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan*:

memiliki masjid maka nilai spiritual tidak akan pernah hilang dari kelembagaan pesantren.

Kedua, Pondok. Setiap pesantren pada umumnya memiliki pondokan atau padepokan, semacam tempat tinggal yang bisa digunakan untuk bermalam oleh peserta didik. Di pondok inilah, seorang santri diwajibkan menunjukkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang dibuat oleh pesantren. Peraturan-peraturan yang dibuat, pada umumnya, bertujuan untuk meneguhkan komitmen santri pada nilai-nilai agama, tidak lebih. Jadi, pondok dan peraturannya adalah media untuk mendekatkan santri pada agama. Dengan sendirinya, nalar religius semakin terbentuk dengan pengetatan aturan pondok bagi para santri.

Ada beberapa alasan pokok pentingnya pondok dalam pesantren, yaitu: a) Banyaknya santri yang berdatangan dari daerah yang jauh untuk menuntut ilmu. Pondok menjadi solusi yang tepat untuk menampung mereka yang ingin belajar agama dan tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan pulang pergi setiap hari. b) Pesantren biasanya terletak di desa, di mana tidak tersedia perumahan untuk menampung santri yang berdatangan dari luar daerah. Berbeda dengan lembaga pendidikan umum yang berada di pinggiran kota, dimana banyak rumah kos-kosan disediakan. Tetapi, sering kali, demi menegatkan aturan, pesantren di kota pun mewajibkan santrinya untuk menetap di pondok, dan c) Adanya sikap sikap timbal balik antara kiai dan santri, sehingga para santri menganggap kiai dan para pengasuh adalah orangtuanya sendiri.³²

Ketiga, Kiai (*anregurutta*). Kiai adalah unsur penting dalam pondok pesantren, sebagai simbol utama agama. Kiai menjadi suritauladan perilaku sehari-hari santri. Karenanya, ciri yang paling esensial bagi suatu pesantren adalah adanya seorang kiai. Mengingat peran fungsi seorang kiai tidak hanya sebagai *leader*, tetapi juga *imam*, sosok tauladan, maka seorang santri yang

Kasus Pondok Pesantren AnNuqayah Guluk-Guluk Sumenep, Madura, Cct. I, (Jakarta: Pedoman Ilmu, 2001), hlm. 19

³² Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Cct. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 63

semakin dekat dengan kiai merasa semakin dekat pula dengan spirit agama. Dengan demikian, keberadaan kiai di tengah-tengah santri adalah bagian penting dari upaya mengokohkan nalar religius di kalangan peserta didik. Jadi, selama ada kiai maka seteguh itu pula nalar religius akan bertahan darii terpaan waktu.

Kiai atau *anregurutta* pada hakikatnya adalah gelar yang diberikan kepada seorang yang mempunyai ilmu agama yang luas, kharismatik dan berwibawa. Gelar kiai adalah identitas kultural yang datang dari masyarakat secara sukarela, bukan politis dan tidak mengandung kepentingan apapun. Gelar kehormatan ini berperan menjaga patok dan standar nilai religius yang sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat. karenanya, keberadaan kiai bukan saja sentral dalam pesantren melainkan juga di mata masyarakat.

Di satu sisi, lembaga pendidikan Islam mendapat keuntungan besar dengan adanya tokoh sentral yang disebut kiai. Tetapi, di era kontemporer ini, gelar kiai mulai terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan duniawi semata, dengan mulai menjauh dari nilai-nilai agama. Maju atau mundurnya satu pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma seorang kiai.³³ Persoalannya, bagaimana dengan para kiai yang belakangan mulai cenderung terjun ke politik dan terbawa arus pragmatisme? Tentu ini bukan tema tulisan ini. Yang jelas, kehadiran kiai dalam pesantren dan asumsi umum tentang sosok kiai adalah sebagai simbol dari nalar religius dalam pondok pesantren.

Keempat, unsur pesantren adalah santri. Secara tradisi, pesantren mengenal dua kelompok santri, yaitu santri muqim dan santri *kalong*. Santri muqim adalah mereka yang menetap di pondok atau asrama pesantren selama memperdalam kajian ilmu agama Islam. Sedangkan santri *kalong* adalah mereka tidak menetap di pondok. Tetapi, santri adalah identitas kultural yang melekat pada orang-orang yang belajar ilmu agama di pesantren. Identitas kultural ini memiliki pengaruh psikologis kepada santri sebagai individu, yaitu komitmen mereka untuk menjaga kesucian nama santri dan citra pesantren sebagai lembaga tempat ia belajar.

³³ M. Bahri Ghazali, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan*, h. 21

Cara yang ditempuh adalah dengan tetap menunjukkan perilaku sehari-hari yang sejalan dengan nilai-nilai agama.

Terakhir, pengajian kitab-kitab klasik (*kuning*). Kitab Islam klasik yang lebih populer dengan kitab kuning atau kitab gundul adalah materi-materi pelajaran yang diajarkan oleh pendidikan pesantren. Di dalam kitab kuning itu terdapat banyak disiplin ilmu pengetahuan Islam, mulai dari kitab-kitab yang berisi pelajaran tentang akidah, hukum, sampai tentang etika. Keberadaan kitab kuning di pesantren adalah pancang bagi bertahannya bangunan nalar religius. Kitab-kitab ini adalah hasil pemikiran para ulama tentang spirit agama Islam, yang diperas dan dikontekstualisasikan pada jamannya. Tetapi, oleh pesantren, kitab kuning dijadikan sumber rujukan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam sebagai wujud interpretatif dari al-Quran dan Hadits; dua sumber utama ajaran Islam.

Pengajaran kitab klasik di pesantren merupakan upaya memelihara dan mentransfer literatur Islam klasik, di satu sisi, dan untuk mempertahankan nilai-nilai Islam yang pernah dipahami oleh para ulama salaf, di sisi lain. Dua fungsi utama kitab kuning inilah berperan serta dalam melestarikan nalar religius pesantren. Pengajaran kitab Islam klasik dijadikan sebagai sarana untuk membekali para santri dengan pemahaman warisan keilmuan Islam masa lampau atau jalan kebenaran menuju kesadaran diri dan pembersihan hati (*tazkiyah al-nafs*). Pengajaran kitab kuning merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk membekali santri sebagai calon ulama dengan ilmu keislaman yang kelak juga ditransfer kepada masyarakat secara lebih luas. Visi inilah yang menyebabkan nalar religius tidak pernah berhenti mengalir, dari kiai ke santri, dari santri ke masyarakat.

D. Lembaga Adat, Wadag Spirit Islam

Nalar rasional dan nalar religius sebagai spirit epistemologi pendidikan Islam di Nusantara dilengkapi dengan nalar kultural. Jenis ketiga ini memanfaatkan segala momentum kebudayaan, adat-istiadat, serta nilai-nilai lokalitas sebagai medium untuk menyampaikan ajaran Islam. spirit epistemologis semacam ini memiliki dasar pemikiran yang kuat, karena Islam itu sendiri

tidak bertentangan dengan kebudayaan lokal. Agama (Islam) dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, keduanya saling melengkapi satu sama lain.

Islam sebagai agama universal merupakan rahmat bagi semesta alam. Sifat rahmat ini membuat Islam mudah berbaur dengan budaya lokal suatu masyarakat (*local culture*), sehingga tidak bisa dipisahkan dari budaya lokal. Keduanya saling mendukung dan melengkapi.³⁴ Tetapi sebagian orang salah memahami posisi kebudayaan lokal di satu sisi dan posisi Islam di sisi lain. Dengan mengatakan bahwa Islam tidak bisa diakurkan dengan budaya lokal, sebagian orang telah salah memahami kebudayaan itu sendiri. Budaya tidak bisa dilepaskan dari cita rasa dan pikiran manusia, termasuk ketika perasaan dan pikiran digunakan sebagai instrumen untuk memahami Islam maka hasil pemikirannya itu adalah produk budaya. Dengan begitu, pro-kontra terhadap diskursu Islam dan budaya lokal adalah pro-kontra produk kebudayaan itu sendiri.

Terlepas dari pro-kontra, kita akan melihat Islam sebagai agama yang diturunkan dan lahir di kota Makkah, dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai Rasul Tuhan untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus. Muhammad adalah manusia produk kultural Timur Tengah, berkebudayaan Timur Tengah, Arab, dan menyampaikan Islam menggunakan media-media yang ada di sekelilingnya. Setelah Nabi Muhammad saw., wafat maka tongkat estafet kepemimpinan Islam diteruskan oleh para sahabat-sahabatnya yang di juluki Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah orang-orang Quraisy namun memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendukung yang berbeda pula.

Pada masa Khalafaur Rasyidin inilah, Islam mulai terpecah belah, bukan karena Islam mengajarkan perbedaan melainkan karena Islam diinterpretasi dengan cara-cara yang berbeda. Perpecahan pada dasarnya adalah produk manusia sendiri, dan itulah dialektika historis-materialis. Pada waktu itu, Islam mulai

³⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadinah, 1992), hlm. 41.

berkembang pesat akibat ekspansi yang dilakukan oleh para daulah Islam setelahnya, seperti Bani Abbasiyah dan Umayyah. Ajaran Islam yang kemudian menyebar luas ke daerah-daerah luar jazirah Arab. Islam tidak lagi menjadi hak prerogatif orang-orang Arab, terlebih untuk menafsiri dan memahaminya. Semua umat muslimpun memiliki hak yang sama untuk memahami al-Quran dan Hadits.

Ajaran Islam segera bertemu dengan berbagai peradaban dan budaya lokal yang sudah mengakar selama berabad-abad. Daerah-daerah yang di datangi oleh para penyebar Islam seperti Mesir, Siria dan daerah-daerah yang lain sudah lama mengenal filsafat Yunani, ajaran Hindu Buddha, Majusi, dan Nasrani. Di sinilah, peradaban Islam semakin besar. Bukan karena Allah swt mengilhami wahyu kepada umat muslim untuk menerima ajaran Islam tetapi karena umat muslim dengan peradaban dan kultur masing-masing berusaha menerjemahkan Islam versi pemahaman mereka. Perjumpaan antara Islam dan kebudayaan lokal menjadi berkah, rahmat, dan bukti peradaban Islam.

Seharusnya begitulah kita memahami Islam yang tersebar, yang senantiasa mengalami penyesuaian diri dengan lingkungan setempa, dengan peradaban dan kebudayaan masyarakat lokal, termasuk ketika Islam bersentuhan dengan kultur masyarakat Indonesia.³⁵

Nurcholish Madjid mengatakan bahwa ajaran Islam dimaksudkan untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad Saw. adalah utusan Tuhan untuk seluruh umat manusia. Dengan begitu, ajaran Islam berlaku bagi seluruh manusia yang tinggal di muka bumi, kapanpun sepanjang sejarah manusia. Islam tidak hanya diperuntukkan bagi bangsa Arab saja. Seluruh bangsa di berbagai negara memiliki hak yang sama.³⁶ Hak semacam apa? Tentu saja hak untuk memahami dengan nalar kultural.

Nalar kultural yang menuntut persamaan hak, kesetaraan, dan kesatuan pola berpikir selaras dengan ciri-ciri Islam itu sendiri,

³⁵ Hariwijaya M., *Islam Kejawaen*, (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2006), hlm. 165-166

³⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, *ibid.*, hlm. 360-361

yang memiliki beberapa konsep fundamental. Pertama, Konsep teologi Islam yang didasarkan pada prinsip tauhid, monotheisme, dengan kadar paling tinggi. Konsep tauhid ini melahirkan wawasan kesatuan moral, kesatuan sosial, kesatuan ritual bahkan malah memberikan kesatuan identitas kultural. Identitas yang bisa disatukan adalah identitas sebagai umat muslim, yang mengakui tiada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Sedangkan, detail kebudayaan dan adat-istiadat mustahil disatukan. Karena hal itu adalah keragaman yang sengaja dibuat Allah untuk kebaikan umat manusia, untuk saling mengenal satu sama lain.

Kedua, konsep kedudukan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan (*hablum minallah*), sesama manusia (*hablum minan nas*), bahkan dengan alam semesta (*hablum minal 'alam*). Nalar kultural mampu memetakan bagaimana seharusnya manusia beretika kepada Tuhan, sesama manusia, dan kepada lingkungan melalui nilai-nilai humanisme yang terus berkembang dari hari ke hari. Al-Quran dan Hadits tidak mengajarkan detail bagaimana mengelola lingkungan supaya menjadi tempat yang asri, sejuk, dan sehat bagi manusia. Tetapi Islam telah mengajarkan bahwa kerusakan di muka bumi disebabkan oleh tangan manusia sendiri. Jadi, untuk mengatasi problem lingkungan, misalnya, umat muslim membutuhkan sumber kearifan lain, semisal dari sains atau dari kearifan lokal. Nalar kultural menjadi instrumen interpretasi terhadap nilai universal Islam.

Ketiga, konsep ilmu sebagai bagian integratif kehidupan manusia. Wahyu perdana al-Qur'an membuat deklarasi tentang penciptaan manusia dan pengajarannya. Allah swt selain menciptakan manusia juga memberi kecerdasan ilmiah untuk mendapat pelajaran. Konsep ini kemudian dipertegas oleh hadits-hadits nabi tentang keutamaan belajar dan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, umat muslim dianjurkan untuk kreatif, memiliki nalar kritis, dan progresif sesuai spirit jaman yang terus berubah.³⁷ Pelajaran hari ini, tepatnya saat tulisan ini dibuat, sebagian umat muslim menghargai kebudayaan lokal, menjadikannya media dakwah Islamiyah, dan tidak mempertentangkan ajaran Islam

³⁷ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perpektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2004), hlm. 4-5.

dengan nilai-nilai lokalitas. Nalar kultural semacamini tentu saja adalah wuju interpretasi atas perintah Islam agar selalu belajar, berpikir, dan mengembangkan kehidupan dunia.

Keahlian mempelari kehidupan dan mengajarkan Islam kepada umat telah dengan amat apik ditunjukkan oleh para wali, da'i-da'i Islam di awal sejarah kedatangannya di Nusantara. Sepertinya, sejarah membuktikan bahwa Islam versi Timur Tengah susah didakwahkan apa adanya tanpa disesuaikan dengan nilai-nilai kultural masyarakat Jawa, Nusantara.³⁸ Melalui berbagai kegiatan kreatif dan jalur-jalur progresif, Islam dapat diterima dengan senang hati oleh masyarakat Nusantara. Padahal, Nusantara adalah basis umat Hindu dan Buddha. Tetapi, lambat laun, pengaruh Islam mampu menggeser posisi pengaruh dua agama India tersebut.

Satu-satunya spirit yang bisa diambil dari para da'i muslim awal adalah nalar kultural yang diaplikasikan dengan baik. Kita bisa mengambil contoh Sunan Kalijaga, yang berdakwah dengan gamelan Sekatennya. Sunan Kalijaga juga membuat lakon-lakon wayang untuk menyelenggarakan pertunjukan wayang.³⁹ Pewayangan, pada waktu itu, adalah media kesenian, hiburan, sekaligus medium edukatif untuk menyampaikan nilai-nilai lokal, global, maupun universal. Sunan Kalijaga masuk ke ranah kesenian dan menggunakan tradisi lokal sebagai medium dakwah. Tentu saja yang terpenting bukan saja apa yang digunakan Sunan Kalijaga dalam menyampaikan ajaran Islam, tetapi mengapa metode semacam itu bisa ditempuh oleh sang Sunan.

Bukan saja Sunan Kalijaga, Sunan Kudus juga menggunakan nalar kultural sebagai basis epistemologis dalam mengajarkan Islam. Dengan melihat konteks kebudayaan lokal, Sunan Bonang, salah satunya, pernah menghias lembu agar dapat menarik jamaah sebelum menyampaikan Islam. Lembu adalah binatang terhormat di mata pemeluk agama Hindu-Budha. Hewan

³⁸ HJ. Benda, "Kontinuitas dan Perubahan dalam Islam di Indonesia," dalam Taufik Abdullah (ed.), *Islam di Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1975), hlm. 33

³⁹ Ki Siswoharsojo, *Guna Cara Agama*, Cet.2, (Yogyakarta: T.P, 1955), hlm. 21-22

yang paling dihormati itu tidak pernah dihias sedemikian rupa seperti yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Padahal, beliau adalah da'i muslim. Tindakan yang nyeleneh dan nyentrik inilah mampu mengundang ketertarikan umat Hindu untuk berkumpul. Bukan hanya itu, Sunan Bonang mengajarkan Suluk hanya pada orang yang sudah punya basis batin yang kuat.⁴⁰ Intinya, para wali telah menanamkan logika nalar kultural dalam epistemologi pendidikan Islamnya.

Nalar kultural tersebut, pada hakikatnya, sejalan dengan apa yang dirumuskan oleh Nurcholish Madjid, bahwa agama (Islam) dan budaya adalah dua bidang yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Agama bernilai mutlak, tidak berubah menurut perubahan waktu dan tempat. Tetapi berbeda dengan budaya, sekalipun berdasarkan agama, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Kebanyakan budaya berdasarkan agama, namun tidak pernah terjadi sebaliknya, agama berdasarkan budaya. Oleh karena itu, agama adalah primer, dan budaya adalah sekunder. Budaya dapat berupa ekspresi hidup keagamaan, karena ia sub-kordinat terhadap agama.⁴¹

Tetapi, mengapa tidak semua orang berpikiran sama? Harun Nasution mengatakan bahwa agama (Islam) memiliki dua kategori umat. Kategori pertama, orang-orang yang meyakini bahwa wahyu Tuhan bersifat absolut, mutlak, kekal, tidak berubah dan tidak bisa diubah. Sedangkan kelompok kedua meyakini bahwa wahyu Tuhan memerlukan penjelasan tentang arti dan pelaksanaannya. Oleh karenanya, penjelasan itu tidaklah absolut, tidak mutlak, bersifat relatif, nisbi dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman atau budaya.⁴² Tetapi, kedua logika dua golongan itu pada dasarnya sama-sama relatif dan subjektif, dan oleh karenanya logika-logika itupun layak disebut nalar kultural,

⁴⁰ Solichin Salam, *Sunan Kudus; Riwayat Hidup Serta Perjuangannya*, (Kudus: Menara Kudus, t.t), hlm. 17

⁴¹ Yustion dkk., *Islam dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini, dan Esok* (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1993), hlm. 172

⁴² Parsudi Suparlan (ed), *Pengetahuan Budaya, Ilmu-Ilmu sosial dan Pengkajian Masalah-Masalah Agama*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama Badan Litbang Agama, 1982), hlm. 18

memberi interpretasi keagamaan sesuai kecenderungan masing-masing.

E. Penutup

Sebagai penutup dari tulisan ini, penulis ingin menyampaikan bahwa trilogi epistemologis pendidikan Islam itu dapat saja menggabungkan ketiga jenis yang ada; rasionalitas, religiusitas, dan lokalitas. Sebagai basis epistemologis, sangat terbuka bagi sistem pendidikan Islam untuk merumuskan pola integratif dari ketiga dimensi tersebut. Sehingga kelak sangat mungkin lembaga kampus, pesantren, dan lembaga adat dapat bekerjasama dalam rangka mencetak generasi ideal, insan kamil, yang betul-betul bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara. Insan Kamil ini tidak hanya memiliki nalar rasional yang empiris-logis-kritis, tetapi juga sangat religius-spiritualis yang tidak meninggalkan nilai-nilai lokalnya sebagai identitas kebangsaan.

Hari ini dunia kampus dan dunia pesantren masih terpisah oleh sebuah jarak berupa sistem manajerial, sekalipun jarak tersebut mulai dipangkas dengan terselenggaranya pendidikan tinggi yang dikelolah oleh pesantren. Satu persatu perguruan tinggi yang berada di bawah Yayasan Pesantren bermunculan, sebagai indikasi bahwa intelektual kita telah menyadari bahwa rasionalias kampus dapat dipertemukan dengan religiusitas pesantren. Tetapi, bagaimana dengan posisi lembaga adat, mungkinkan bisa disandingkan dengan sistem pesantren dan kampus? Upaya-upaya ke arah sana sudah mulai menggeliat walaupun belum massif, dan penelitian yang mengangkat tema tersebut sangat dinantikan sebagai kelanjutan dari wacana dalam tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- “Surat Direktur Pekerjaan Umum J. Homan van der Heide kepada Gubernur Jenderal Idenburg” tanggal 27 Januari 1913 nomor 1606/D. dalam Depdikbud RI, *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), hlm. 1
- “Surat Direktur Pendidikan dan Agama G.A.J. Hazeu kepada Gubernur Jenderal Idenburg”, tanggal 27 November 1914 nomor 23814, dalam Depdikbud RI, *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*, *ibid.*, hlm. 3
- A. Mujib, et. al., *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren*, Cet. III, (Jakarta: Diva Pustaka, 2006)
- Ahmad Al-Usairy, *Sejarah Islam, Sezak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, (Jakarta: Akbar Media, 2003)
- Ahmad Sugiri, “Proses Islamsisasi dan Percaturan Politik Umat Islam di Indonesia”, dalam *Al-Qalam, Majalah Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan*, No. 59/XI/1996, (Serang: IAIN SGD, 1996)
- Amin Haedari, et al., *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplexitas Global*, Cet. I, (Jakarta: IRD Press, 2004)
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Badri Yatim, *Sejarah Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 1998)
- Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi pustaka publisher, 2007)
- Busman Edyar, dkk (Ed.), *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2009)
- Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep & Teori*, (Bandung: Refika Aditama, 20013)
- Enung K. Rukiati dan Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam*

- di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
- Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Hariwijaya M., *Islam Kejawen*, (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2006)
- Helius Syamsuddin, dkk., *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*, (Jakarta: Depdikbud Dirjen Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan DOKumentasi Sejarah Nasional, 1993)
- HJ. Benda, "Kontinuitas dan Perubahan dalam Islam di Indonesia," dalam Taufik Abdullah (ed.), *Islam di Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1975)
- Ki Siswoharsojo, *Guna Cara Agama*, Cet.2, (Yogyakarta: T.P, 1955)
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Perguruan Tinggi dan Pembangunan Berkelanjutan (sebuah tinjauan aspek hukum)*, (Jakarta: Dirjen Dikti Diknas, 2001)
- Lois Tyson, *Critical Theory Today: A User-Friendly Guide*, cet.2, (New York: Routledge, 2014)
- M. Bahri Ghazali, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan: Kasus Pondok Pesantren AnNuqayah Guluk-Guluk Sumenep, Madura*, Cet. I, (Jakarta: Pedoman Ilmu, 2001)
- Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perpektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2004)
- Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadinah, 1992)
- Parsudi Suparlan (ed), *Pengetahuan Budaya, Ilmu-Ilmu sosial dan Pengkajian Masalah-Masalah Agama*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama Badan Litbang Agama, 1982)

- Prof. Dr. Enoch Markum (ed.), *Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2007)
- Prof. S. Nasution, M.A., *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994)
- Rusminah, (dkk). “Perguruan Tinggi Agama Islam (UIN, IAIN, dan STAIN)”, dalam *Insan Cendekia*, 2010.
- Solichin Salam, *Sunan Kudus; Riwayat Hidup Serta Perjuangannya*, (Kudus: Menara Kudus, t.t)
- Sulthon Masyhud, et al., *Manajemen Pondok Pesantren*, Cet. II, (Jakarta: Diva Pustaka, 2004)
- Tim Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Profil Pondok Pesantren Mu’adalah* Cet. I, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Departemen Agama, 2004)
- Uka Tjandrasasmita (Ed.), *Sejarah Nasional Indonesia III*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984)
- UU No. 12 Tahun 2012, Pasal 1 ayat 9
- Yustion dkk., *Islam dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini, dan Esok* (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1993)
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Memadu Modernitas untuk Kemajuan*, Cet. I, (Jakarta; Pesantren Nawesea Press, 2009)